

Media Sosial dan Digitalisasi Partisipasi Politik pada Generasi Muda: Perspektif Indonesia

Muhammad Saud ^{1,*} , Rachmah Ida ² , Ansar Abbas ³ , Asia Ashfaq ⁴ ,
dan Araz Ramazan Ahmad ^{5, 6} 

¹ Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Airlangga, 60286, Surabaya, Indonesia

² Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Airlangga, 60286, Surabaya, Indonesia

³ Program Studi Doktor Ilmu Manajemen, Departemen Manajemen,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, 60285, Surabaya, Indonesia

⁴ Department of Humanities and Social Sciences, Bahria University, 44000, Islamabad, Pakistan

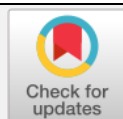
⁵ Department of Administration, University of Raparin, 46012, Ranya, Kurdistan Region, Iraq

⁶ Department of International Relations and Diplomacy, Faculty of Administrative Sciences and
Economics, Tishk International University, 44001, Erbil, Kurdistan Region, Iraq

* Korespondensi: rachmah.ida@fisip.unair.ac.id

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:
Artikel Penelitian
Tahap Awal



Sitasi Cantuman:

Saud, M., Ida, R., Abbas, A.,
Asfaq, A., & Ahmad, A. R. (2020).
*The Social Media and
Digitalization of Political
Participation in Youths: An
Indonesian Perspective*. *Society*,
8(1), 83-93.

DOI : [10.33019/society.v8i1.160](https://doi.org/10.33019/society.v8i1.160)

Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh
Penulis, dipublikasi oleh Society

OPEN  ACCESS



Artikel dengan akses terbuka.

ABSTRAK

Digitalisasi di era modern telah memberikan peluang bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam bidang informasi dan sosial ini. Penggunaan media sosial yang terkonsentrasi telah berkontribusi pada faktor menakutkan di antara para pemilih di mana media sosial telah mengubah preferensi kaum muda terhadap hak untuk memilih. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kontribusi dan preferensi generasi muda terhadap partisipasi politik dalam diskusi kontemporer di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik purposive random sampling untuk memberikan peluang yang sama bagi setiap responden. Mode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan survei online. Mayoritas responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa universitas. Data dikumpulkan pada April 2019 untuk menyelidiki minat generasi muda dalam pemilihan umum di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa media sosial dan situs jejaring sosial (Social Networking Sites atau SNS) telah menyediakan platform yang unik untuk mendiskusikan masalah politik dan 'mengambil terpisah' dalam diskusi politik. Penelitian ini menyarankan beberapa rekomendasi untuk penggunaan media sosial untuk sosialisasi

Lisensi: Atribusi-
NonKomersial-BerbagiSerupa
(CC BY-NC-SA)

Dikirim: 17 Maret, 2020;
Diterima: 10 April, 2020;
Dipublikasi: 23 April, 2020;

generasi muda.

Kata Kunci: Generasi Muda; Indonesia; Jejaring; Media Sosial; Pemilih; Politik

1. Pendahuluan

Dalam sejarah Indonesia, para mahasiswa telah berpartisipasi dalam banyak forum untuk meningkatkan status materi terhadap manfaat publik (Altbach, 2007), yang diwujudkan dalam gerakan mahasiswa adalah kegiatan atau aktivitas mahasiswa dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi dan mengasah kecerdasan mereka dalam kepemimpinan. Demo atau unjuk rasa baru-baru ini yang merupakan fenomena di Indonesia telah menarik perhatian penelitian ini.

Generasi muda adalah aset negara; pemuda dengan jumlah besar dapat mendorong dinamisme yang diperlukan untuk mengubah kondisi sosial kelompok. Selain peluang untuk prospek dan kompensasi yang akan dimiliki generasi muda, akan menjadi kekacauan ketika negara tidak memberikan peluang terbaik bagi mereka. Keteguhan politik dan penguatan standar demokrasi adalah kepentingan utama bangsa, dan peran partisipasi generasi muda dalam proses ini sangat penting.

Media sosial telah mengubah tingkat partisipasi di antara pemilih dan publik (Boulianne, 2009). Orang menggunakan internet dalam kuantitas yang tinggi, dan dengan demikian penggunaan internet sebagai media dapat mempengaruhi partisipasi dalam proses politik. Situasi di Indonesia, generasi muda di kota-kota berpartisipasi dalam banyak kegiatan politik. Internet menjadi bagian paling penting dari partisipasi dalam politik mahasiswa dalam demo (Woodly, 2008). Media online memiliki banyak efek positif dan mudah untuk menyebarkan informasi atau pengetahuan kepada orang lain (Gil de Zúñiga et al., 2010). Seperti di Indonesia, penggunaan media sosial dinyatakan gigih dalam aktivisme dan keterlibatan politik (Ida et al., 2020a).

Orang memilih untuk berpartisipasi dalam politik karena berbagai alasan. Ini adalah cara terbaik bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam partisipasi politik untuk membuat perubahan signifikan dalam masyarakat. Semakin orang-orang terlibat dalam politik di tingkat nasional, kemungkinan semakin lebih memahami situasi politik di negara mereka dan mengkritik kesalahan pemerintah. Oleh karena itu, warga dapat mengatasinya dengan menemukan solusi untuk masalah mereka jika mereka dapat memahami politik. Namun, jika warga negara khususnya memiliki pemahaman politik, maka mereka dapat menjadi bagian dari tindakan politik atau kegiatan demokrasi, maka pemerintah dapat mewujudkan tingkat kepuasan masyarakat di antara warga negara. Partisipasi politik di negara mana pun akan mengarah pada penguatan sistem politik. Jika setiap warga negara dapat berpartisipasi, maka akan menjadi sangat sulit bagi pemerintah untuk mengabaikan permasalahan warga negara. Dengan demikian, peningkatan keterlibatan dalam kegiatan politik harus memahami masalah sosial-politik.

Dengan demikian, orang-orang sering termotivasi untuk berpartisipasi dalam politik karena mereka adalah sasaran dalam perjuangan mobilisasi oleh partai politik dan kelompok kepentingan. Orang-orang biasa berpartisipasi secara politik melalui sosialisasi politik atau memiliki pengalaman hidup sendiri yang mendorong mereka untuk berpartisipasi. Ada dua

faktor utama dalam aktivisme politik, 1) partisipasi sipil, dan 2) pemahaman efikasi politik (De Vreese, 2007). Dua faktor ini dapat mendorong dan mempengaruhi remaja untuk memutuskan apakah mereka ingin berpartisipasi atau tidak. Tetap mengingat situasi politik di Indonesia, partisipasi pemuda, karena berbagai alasan, berkontribusi terhadap perubahan politik negara (Ida *et al.*, 2020b). Orang-orang mungkin mencari kepuasan pribadi melalui tindakan legislatif, karena mereka bersedia bekerja dengan tetangga mereka dan orang lain dalam membantu komunitas mereka. Pendaftaran pemilih merupakan faktor penting dan dapat menghambat partisipasi politik (Klemmensen *et al.*, 2012). Persepsi umum bahwa pemuda di Indonesia lebih menyadari tentang keputusan politik dan keterlibatan masyarakat untuk mengubah skenario politik Indonesia, dan itu adalah fitur penting dari penelitian ini.

1.1. Partisipasi Online dan Kontribusi Media Sosial

Proliferasi teknologi digital (Web 2.0) telah mengubah dinamika politik (Spencer, 2017; Ash *et al.*, 2018). Ini menjadi mungkin karena adopsi yang luas dari Situs Jejaring Sosial (SNS). Akibatnya, SNS telah diakui sebagai teknik perubahan sosial yang dapat secara efektif digunakan untuk pembelajaran politik dan sosialisasi pemilih (Feenstra & Casero-Ripollés, 2014).

Penelitian ini menyelidiki dampak dari media sosial dan pengaruhnya terhadap partisipasi politik, karena media sosial juga mencoba untuk memberikan perhatian pada pilihan politik responden. Ada berbagai argumen tentang media sosial dan debat politik (Theocharis, 2015). Partisipasi reguler di media sosial atau *offline* atau *online* dapat menekankan pemerintah atau negara untuk melakukan beberapa tindakan (Verba *et al.*, 1995).

Theocharis (2015) mengemukakan bahwa analisis keterlibatan politik saat ini harus memperhitungkan biaya platform digital seperti situs jejaring sosial. Namun, penggunaan media sosial dan partisipasi politik adalah cara berbagi materi kepada para pengikutnya, faktor utama berbagi untuk menyadarkan para pengikut untuk beberapa masalah (Calenda & Meijer, 2009). Jenis partisipasi ini dapat mempengaruhi pengetahuan politik, perilaku politik, dan yang terpenting, hal ini dapat mendorong partisipasi *online* (Bode, 2017).

1.2. Generasi Muda sebagai Generasi untuk Perubahan

Generasi muda adalah aktor kunci dalam sebagian besar proses perubahan ekonomi dan sosial. Mereka memiliki konsepsi generasi muda mereka sendiri, sejauh dapat dipelajari dari beberapa penelitian tentang fenomena ini yang tampaknya menghubungkan transisi dari generasi muda dengan kemampuan untuk menilai, mana yang salah dan mana yang benar, dan transisi dari generasi muda ke arah hak politik.

1.3. Konsep Youth-Inn

Setiap tahun pada tanggal 28 Oktober orang-orang Indonesia merayakan 'Hari Sumpah Pemuda'. Mengingat pentingnya kaum muda untuk sikap nasional di mana mereka menghargai kontribusi generasi muda dalam kemerdekaan Indonesia. Menurut statistik, sekitar 64 juta populasi adalah generasi muda (Yenuarizki *et al.*, 2019). Partisipasi yang berharga dari generasi muda dalam masalah-masalah politik telah berkontribusi pada sejumlah peristiwa politik, demo, dan program bersejarah lainnya, yang telah mendukung posisi mereka dan keinginan yang kuat atas kebutuhan mereka dalam struktur politik. Konsep *Youth-Inn* juga mendukung argumen penelitian ini dimana meningkatnya generasi muda untuk berpartisipasi dalam kampanye, protes, kampanye pemilihan umum dan banyak lagi (Saud *et al.*, 2020).

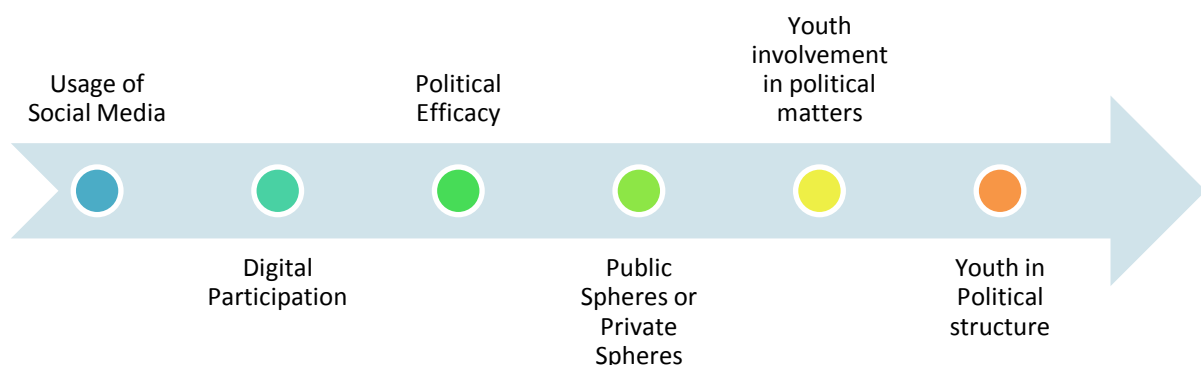
1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk meneliti peran media sosial untuk mempromosikan keterlibatan politik;
- 2) Bagaimana generasi muda di Indonesia berpartisipasi dalam kegiatan politik secara *online* dan *offline*.

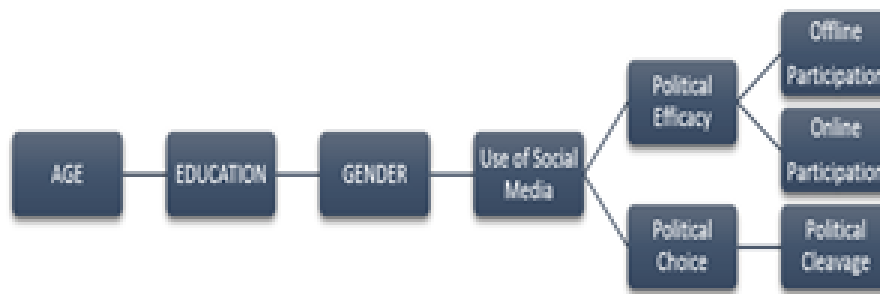
2. Model Penelitian

Dalam **Gambar 1** dan **Gambar 2**, model dan kerangka kerja penelitian telah dibangun untuk menangani temuan penelitian. MacAfee & De Simone (2012) menyatakan bahwa faktor usia adalah variabel penting untuk partisipasi online dan offline. Usia dan partisipasi generasi muda dalam kegiatan politik memiliki dampak positif pada partisipasi politik (Wang, 2007). Hal ini juga ditemukan dalam penelitian bahwa pemuda memiliki efek positif pada partisipasi politik dan mereka lebih aktif dibandingkan dengan publik (Oser *et al.*, 2013). Konstruksi sosial dan ilmiah generasi muda cenderung melihatnya sebagai periode “transisi” dari masa kanak-kanak ke dewasa, dari pendidikan ke pekerjaan, dari keluarga asal ke keluarga tujuan (Lloyd, 2005; Roberts, 2009). Hal yang sama juga terjadi dengan literatur kebijakan, seperti dalam laporan World Bank tentang pembangunan dan generasi masa depan yang memandang pemuda dalam kaitannya (World Bank, 2006). Variabel kedua adalah preferensi gender, dan penelitian yang relevan menemukan bahwa keterlibatan dalam kegiatan politik, pria lebih suka berpartisipasi dibandingkan dengan wanita (Baskaran & Hessami, 2018). Situasi di Indonesia, ditemukan bahwa sebagian besar pesantren memiliki jumlah siswa laki-laki yang tinggi, dan mereka aktif dalam masalah politik maupun sosial dari organisasi (Nisa, 2018).



Gambar 1. Kerangka penelitian.

Kerangka kerja penelitian ini juga menggambarkan bahwa, jika penggunaan media sosial akan meningkat, maka peluang partisipasi politik atau digital dapat diperkuat. Dengan demikian, keterlibatan pemuda dalam peran privat (pribadi) dan publik (masyarakat) penting untuk meningkatkan efikasi politik dan pembelajaran politik mereka.



Gambar 2. Model penelitian.

2.1. Model Teoritis

Kerangka kerja teoritis dari penelitian ini menjelaskan bahwa kaum muda biasa mendiskusikan masalah-masalah politik di ranah *online* dan *offline* (ranah publik dan privat). Ruang publik tidak terbatas pada media atau informasi sosial-spasial untuk publik. Ruang publik menyediakan debat publik dan memobilisasi massa ke dalam masalah tertentu. Dengan demikian, ini adalah bagaimana masyarakat sipil aktif melalui ruang publik membuat massa ke arah diskusi tertentu (Stewart, 2001).

Selain itu, internet dan media sosial mempengaruhi orang untuk berpartisipasi dalam kampanye dan melakukan tindakan kolektif. 'Twitter' sekarang menjadi cara sehari-hari untuk mengubah informasi, dan secara global menarik khalayak internasional. Orang-orang dari berbagai latar belakang menggunakan twitter untuk berita, urusan sosial, dan, yang paling penting, untuk komunikasi politik oleh para pemimpin politik, jurnalis, dan pengguna internet (Kaufmann & Jeandesboz, 2017).

Demikian pula, situasi di Tunisia dan Mesir pada 2011, Blankson & Murphy (2007) menyatakan bahwa komunikasi politik dan pelaku sosial secara luas berpartisipasi dalam mobilisasi, karena mereka memiliki koneksi yang dekat akses mudah ke teknologi. Sebuah pernyataan terkenal oleh Clinton (2010) menyatakan bahwa kebebasan internet adalah kebijakan baru dalam kebijakan luar negeri AS. Terbukti bahwa media sosial telah mendapatkan banyak perhatian di masyarakat, dan itu mencakup lebih dari dua juta pengguna di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan teori terkenal, Habermas (1996), 'ruang publik'. Teori ini menyatakan bahwa penggunaan publik untuk membahas masalah-masalah umum mereka di ruang publik. Sedangkan siswa/mahasiswa dalam penelitian ini penggunaannya untuk membahas masalah politik mereka di ruang publik (baik *online* atau *offline*).

Singkatnya, hasil statistik literatur menyatakan bahwa orang cenderung berpartisipasi dalam media sosial. Terbukti secara luas bahwa media sosial meningkatkan peluang untuk berpartisipasi dalam masalah politik. Dengan demikian, dari penelitian ini, media sosial mengubah pola partisipasi politik di Indonesia; itu mengubah bentuk politik.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dan kuesioner disiapkan untuk mengumpulkan data. Data dikumpulkan pada bulan April 2019. Penelitian ini dilakukan di Indonesia. Mode pengumpulan data adalah survei *online*, yang dilakukan melalui Google Forms. Mayoritas responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa universitas. Penelitian ini juga mengalokasikan kerangka waktu untuk mengetahui fakta aktual dari situasi tersebut.

3.1. Teknik Pengambilan Sampel dan Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini dirancang untuk mendapatkan data dari siswa/mahasiswa yang saat ini terdaftar di universitas di Indonesia. Tujuan survei untuk mengumpulkan data dari para siswa/mahasiswa yang memiliki latar belakang politik, asosiasi politik, keterlibatan politik dan saat ini memiliki akun media sosial. Penelitian ini memilih teknik *purposive random sampling* untuk mengumpulkan data dan hasilnya dilakukan dalam tabulasi, angka, dan frekuensi.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sampel keseluruhan model penelitian ($n=400$) yang menunjukkan variabel sosio-demografis adalah tingkat pendidikan, generasi baru dan pria lebih diharapkan untuk berpartisipasi dalam politik yang dapat meningkatkan efikasi politik di antara individu. **Tabel 1** menunjukkan hasil efektivitas dan media sosial yang membuat anak-anak menyadari untuk berpartisipasi dan menggunakan akun media sosial untuk keterlibatan politik.

Variabel efikasi politik dan penggunaan internet menunjukkan hubungan yang signifikan yang menunjukkan hubungan kuat antara partisipasi *online* dan *offline*. Ada juga prediksi bahwa pengguna internet cenderung berpartisipasi dan memiliki pengetahuan yang cukup tentang masalah politik, yang biasanya membantu untuk membahas masalah politik di ranah *offline*. Ini menyimpulkan bahwa internet menyediakan platform bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam masalah politik (Masiha *et al.*, 2018).

Karena generasi muda adalah sumber utama Indonesia, maka para responden lebih cenderung percaya bahwa mereka dapat berkontribusi pada perubahan politik negara mereka. Mayoritas responden menunjukkan bahwa generasi muda dapat mengubah skenario politik negara mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Papacharissi (2002) dan Gripsrud (2020) menemukan bahwa keterlibatan generasi muda dalam ruang publik dapat mencerahkan masa depan mereka.

Variabel sosial-demografis, pendidikan, dan gender memiliki efek yang dekat pada efikasi politik dan media sosial, dan usia dianggap sebagai indikator signifikan dalam partisipasi politik (Saud, 2018). Hasilnya menunjukkan bahwa warga negara Indonesia berpartisipasi dalam politik baik secara *offline* maupun *online*. Pendidikan juga merupakan variabel substansial yang mempengaruhi partisipasi pemuda dalam seminar atau dialog politik (Freedman, 2018; Saud, 2020). Semakin orang-orang memiliki banyak pengetahuan, semakin mereka tertarik untuk berpartisipasi untuk hak-hak mereka (Manathunga, 2019). Ada efek tidak langsung yang signifikan dari efikasi pada partisipasi politik *online* dan *offline*.

Tabel 1. Distribusi frekuensi mengenai usia dan pendidikan responden

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
A	Jenis kelamin responden		
1	Pria	185	46,2
2	Wanita	215	53,8
	Total	400	100,0
B	Usia responden		
1	18-22 tahun	221	55,3
2	23-27 tahun	117	29,2
3	28 tahun ke atas	62	15,5
	Total	400	100,0

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
C	Kualifikasi pendidikan responden		
1	SMA/SMK	102	25,5
2	Diploma	56	14,0
3	Sarjana	162	40,5
4	Magister	80	20,0
	Total	400	100,0

Data membahas karakteristik demografis responden, usia, pendidikan, dan jenis kelamin. **Tabel 1** menunjukkan bahwa usia, yang diukur sebagai indikator positif untuk penelitian ini, menunjukkan partisipasi politik generasi muda. Variabel usia dan jenis kelamin juga membantu mengidentifikasi rasio responden mengenai perbandingan partisipasi politik mereka.

Lebih dari setengah (53,8%) responden adalah perempuan, dan kurang dari setengah (46,2%) responden adalah pria. Hasil data yang tertera dalam tabel di atas menggambarkan usia responden. Lebih dari setengah (55,3%) responden dalam penelitian ini adalah usia 18-22 tahun, sejumlah kecil (29,2%) kelompok usia 23-27 tahun, dan sejumlah sangat kecil (15,5%) kelompok usia 28 tahun dan di atas.

Usia antara 18 hingga 22 tahun, sebagian besar aktif dan terlibat dengan politik domestik mereka, di mana itu menandakan indikator positif bagi potensi partisipasi politik kaum muda. Variabel usia dan jenis kelamin juga membantu mengidentifikasi rasio responden mengenai perbandingan partisipasi politik mereka.

Pendidikan adalah indikator yang sangat penting untuk memahami politik, dan meningkatkan efikasi politik di antara responden, seperti kesadaran mereka akan partisipasi politik dan memilih kandidat yang tepat saat menggunakan hak politik. Pendidikan dapat diukur dan dijelaskan dalam kategori Menengah (Sekolah Menengah Atas/Kejuruan), Diploma, Sarjana dan Magister. Kurang dari setengah (40,0%) dari responden adalah sarjana (S1) dan di atas, sementara hampir sepertiga (25,5%) mendapat pendidikan antar tingkat (SMA/SMK), 14,0% telah lulus tingkat diploma dan 20,0% terakhir responden menempuh Magister (S2).

Penelitian yang dilakukan oleh [Mutz & Mondak \(2006\)](#) menekankan bahwa semakin tinggi kualitas pendidikan, semakin banyak yang akan berpartisipasi dalam politik. Lebih jauh, pendidikan adalah aktor terbaik yang menyebabkan pemungutan suara dan berpartisipasi dalam politik.

Tabel 2. Frekuensi responden mengikuti berita yang berorientasi politik (aktivitas politik) di media sosial

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Sering	230	57,5
2	Beberapa kali dalam seminggu	108	27,0
3	Sekali dalam seminggu	21	5,3
4	Jarang	41	10,2
	Total	400	100,0

Tabel 2 menunjukkan temuan tentang seberapa sering responden berpartisipasi di media sosial. Lebih dari setengah (57,5%) responden secara teratur mengikuti berita yang berorientasi

politik di ponsel mereka melalui media sosial; di antara mereka, ada 27,0% responden beberapa kali seminggu menggunakan media sosial untuk berpartisipasi seperti posting, membaca, dan menulis komentar pada literatur sosial dan politik. Juga, sangat sedikit (10,2%) yang jarang menggunakan media sosial, dan hanya (5,3%) responden yang menggunakan media sosial seminggu sekali untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Peran media sosial juga merupakan bagian penting dalam kesadaran masyarakat. Thompson (2013) berpendapat bahwa media sosial bahkan adalah masyarakat yang bersosialisasi dan itu adalah ruang publik yang signifikan dalam komunitas industri. Namun, hal itu juga ditegaskan oleh Montgomery *et al.*, (2008) di era digital ini, keberagaman media massa dan internet memiliki peran signifikan dalam masyarakat.

5. Kesimpulan

Sejarah telah membuktikan bahwa generasi muda telah berhasil, tetapi tantangan terus datang, dari dalam dan luar negeri. Generasi muda harus belajar dari sejarah untuk memiliki identitas dan memiliki fondasi yang kuat, dan untuk mengetahui di mana perubahan harus diperjuangkan. Penelitian ini menemukan bahwa generasi di Indonesia termotivasi untuk berpartisipasi dalam masalah politik, partisipasi mereka telah meningkatkan efikasi politik, dan dengan demikian perpecahan politik menjadi perhatian. Juga ditemukan bahwa variabel sosio-demografis mempengaruhi individu untuk memilih partai atau kandidat tertentu (Bandura, 1995). Penelitian ini menyimpulkan bahwa generasi muda adalah indikator utama perubahan dalam masyarakat, dan di masyarakat Indonesia, jumlah generasi muda sangat tinggi. Ini adalah kesempatan emas bagi pemerintah untuk melibatkan generasi muda dalam permasalahan yang dihadapi untuk mempertahankan kebijakan yang kuat di media sosial dan generasi muda.

6. Ucapan Terima Kasih

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada responden yang telah berkontribusi dalam penelitian ini. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada 2 *reviewer* anonim atas masukan, saran, dan koreksi mereka selama proses peninjauan artikel ini.

7. Pernyataan *Conflicts of Interest*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

Daftar Pustaka

- Altbach, P.G. (2007) Student Politics: Activism and Culture. In: Forest J.J.F., Altbach P.G. (eds) International Handbook of Higher Education. Springer International Handbooks of Education, vol 18. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-4012-2_17
- Ash, J., Kitchin, R., & Leszczynski, A. (2018). Digital turn, digital geographies? *Progress in Human Geography*, 42(1), 25–43. <https://doi.org/10.1177/0309132516664800>
- Bandura, A. (1995). *Social foundations of thought and action: A social cognitive theory*. Englewood Cliffs, N.J: Prentice Hall.
- Baskaran, T., & Hessami, Z. (2018). Does the election of a female leader clear the way for more women in politics? *American Economic Journal: Economic Policy*, 10(3), 95–121. <https://doi.org/10.1257/pol.20170045>

- Blankson, I. A., & Murphy, P. D. (2007). *Negotiating democracy: Media transformations in emerging democracies*. *Negotiating Democracy: Media Transformations in Emerging Democracies* (pp. 1–285). State University of New York Press.
- Bode, L. (2017). Closing the gap: gender parity in political engagement on social media. *Information Communication and Society*, 20(4), 587–603. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2016.1202302>
- Boulianne, S. (2009). Does internet use affect engagement? A meta-analysis of research. *Political Communication*, 26(2), 193–211. <https://doi.org/10.1080/10584600902854363>
- Calenda, D., & Meijer, A. (2009). Young People, The Internet And Political Participation. *Information, Communication & Society*, 12(6), 879–898. <https://doi.org/10.1080/13691180802158508>
- Clinton, P. B. (2010). *My life*. New York: Random House.
- De Vreese, C. H. (2007). Digital renaissance: young consumer and citizen?. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 611(1), 207–216. <https://doi.org/10.1177/0002716206298521>
- Feenstra, R. A., & Casero-Ripollés, A. (2014). Democracy in the digital communication environment: A typology proposal of political monitoring processes. *International Journal of Communication*, 8(1), 2448–2468. <https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/2815>
- Freedman, K. (2018). Art education as social production: Culture, society, and politics in the formation of curriculum. In *The Formation of School Subjects: The Struggle for Creating an American Institution* (pp. 63–84). Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9780429454165-3>
- Gil de Zúñiga, H., Veenstra, A., Vraga, E., & Shah, D. (2010). Digital democracy: Reimagining pathways to political participation. *Journal of Information Technology and Politics*, 7(1), 36–51. <https://doi.org/10.1080/19331680903316742>
- Gripsrud, J. (2020). Public Sphere. In *The International Encyclopedia of Journalism Studies* (eds T.P. Vos, F. Hanusch, D. Dimitrakopoulou, M. Geertsema-Sligh and A. Sehl). doi:10.1002/9781118841570.iejs0055
- Habermas, J. (1996). *Contributions to a discourse theory of law and democracy*. Cambridge: Polity Press.
- Ida, R., Saud, M., & Mashud, M. (2020). Persistence of social media on political activism and engagement among Indonesian & Pakistani youths. *Journal of Web-based Communities, Inderscience Publisher*. <https://doi.org/10.1504/IJWBC.2020.10028448>
- Ida, R., Saud, M., & Mashud, M. (2020). An empirical analysis of social media usage, political learning and participation among youth: a comparative study of Indonesia and Pakistan. *Quality & Quantity: International Journal of Methodology*, 1–13. <https://doi.org/10.1007/s11135-020-00985-9>
- Kaufmann, M., & Jeandesboz, J. (2017). Politics and ‘the digital’: From singularity to specificity. *European Journal of Social Theory*, 20(3), 309–328. <https://doi.org/10.1177/1368431016677976>
- Klemmensen, R., Hatemi, P. K., Hobolt, S. B., Petersen, I., Skytthe, A., & Nørgaard, A. S. (2012). The genetics of political participation, civic duty, and political efficacy across cultures: Denmark and the United States. *Journal of Theoretical Politics*, 24(3), 409–427. <https://doi.org/10.1177/0951629812438984>
- Lloyd, M. (2005). *Beyond identity politics: Feminism, power & politics*. *Beyond Identity Politics: Feminism, Power and Politics*. London: SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.4135/9781446221914>

- MacAfee, T., & De Simone, J. J. (2012). Killing the bill online? Pathways to young people's protest engagement via social media. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 15(11), 579–584. <https://doi.org/10.1089/cyber.2012.0153>
- Manathunga, C. (2019). 'Timescapes' in doctoral education: the politics of temporal equity in higher education. *Higher Education Research and Development*, 38(6), 1227–1239. <https://doi.org/10.1080/07294360.2019.1629880>
- Masiha, S., Habiba, U., Abbas, Z., Saud, M., & Ariadi, S. (2018). Exploring the link between the use of facebook and political participation among youth in Pakistan. *Journal of Political Sciences & Public Affairs*, 6(1), 1-7. <https://doi.org/10.4172/2332-0761.1000315>
- Montgomery, K. C., Earl, J., Foot, K. A., & Xenos, M. (2008). *Civic life online: Learning how digital media can engage youth*. Cambridge, Mass: MIT Press.
- Mutz, D. C., & Mondak, J. J. (2006). The workplace as a context for cross-cutting political discourse. *Journal of Politics*, 68(1), 140–155. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2508.2006.00376.x>
- Nisa, E. F. (2018). Creative and Lucrative Dawa: The Visual Culture of Instagram amongst Female Muslim Youth in Indonesia. *Asiascape: Digital Asia*, 5(1-2), 68-99. <https://doi.org/10.1163/22142312-12340085>
- Oser, J., Hooghe, M., & Marien, S. (2013). Is Online Participation Distinct from Offline Participation? A Latent Class Analysis of Participation Types and Their Stratification. *Political Research Quarterly*, 66(1), 91–101. <https://doi.org/10.1177/1065912912436695>
- Papacharissi, Z. (2002). The virtual sphere: The internet as a public sphere. *New Media and Society*, 4(1), 9–27. <https://doi.org/10.1177/14614440222226244>
- Roberts, S. K. (2009). *Infectious fear: Politics, disease, and the health effects of segregation. Infectious Fear: Politics, Disease, and the Health Effects of Segregation*. Chapel Hill: University of North Carolina Press. <https://doi.org/10.1093/jhmas/jrq009>
- Saud, M. (2018). Social networks and social ties: Changing trends of political participation among youth in Punjab-Pakistan. *Journal of Advances in Humanities and Social Sciences*, 4(5), 214-221. <https://doi.org/10.20474/jahss-4.5.3>
- Saud, M. (2020). Youth participation in political activities: The art of participation in Bhakkar, Punjab Pakistan. *Journal of Human Behavior in Social Environment*. <https://doi.org/10.1080/10911359.2020.1745112>
- Saud, M., Ida, R., & Mashud, M. I. (2020). Democratic practices and youth in political participation: a doctoral study. *International Journal of Adolescence and Youth*, 25(1), 800-808. <https://doi.org/10.1080/02673843.2020.1746676>
- Spencer, D. (2017). Work in and beyond the Second Machine Age: the politics of production and digital technologies. *Work, Employment and Society*, 31(1), 142–152. <https://doi.org/10.1177/0950017016645716>
- Stewart, A. (2001). *Theories of power and domination: The politics of empowerment in late modernity* London: SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.4135/9781446219881>
- Theocharis, Y. (2015). The Conceptualization of Digitally Networked Participation. *Social Media + Society*, 1(2), 1-14. <https://doi.org/10.1177/2056305115610140>
- Thompson, J. B. (2013). *Political Scandal: Power and Visibility in the Media Age*. New York: John Wiley & Sons.
- Verba, S., Scholzman, K. L., & Brady, H. E. (1995). *Voice and equality: Civic voluntarism in American politics*. Cambridge: Harvard University Press.

- Wang, S. I. (2007). Political use of the internet, political attitudes and political participation. *Asian Journal of Communication*, 17(4), 381–395. <https://doi.org/10.1080/01292980701636993>
- Woodly, D. (2008). New competencies in democratic communication? Blogs, agenda setting and political participation. *Public Choice*, 134(1–2), 109–123. <https://doi.org/10.1007/s11127-007-9204-7>
- World Bank. (2006). *World Development Report 2007 : Development and the Next Generation*. Washington, DC: World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/5989>
- Yunearizki, Y., Febriana, K., & Febianisari, N. (2019, October 30). *Listening to the youth: Are we all ready?* Retrieved from The Jakarta Post: <https://www.thejakartapost.com/academia/2019/10/30/listening-to-the-youth-are-we-all-ready.html>

Tentang Penulis

1. **Muhammad Saud**, Staf-Dosen Internasional di Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia.
E-Mail: muhhammad.saud@gmail.com
2. **Rachmah Ida**, meraih gelar Doktor dari Curtin University of Technology, Perth, Australia. Penulis adalah Profesor dalam bidang Media, Kebudayaan, dan Masyarakat di Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia.
E-Mail: rachmah.ida@fisip.unair.ac.id
3. **Ansar Abbas**, Mahasiswa Doktoral Program Studi Doktor Ilmu Manajemen, Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia.
E-Mail: ansar.abbas-2018@feb.unair.ac.id
4. **Asia Ashfaq**, Dosen di Department of Humanities and Social Sciences, Bahria University, Islamabad, Pakistan. Area penelitian: Migrasi, Kesehatan, Gender, dan Gerontologi.
E-Mail: asiaashfaq.buic@bahria.edu.pk
5. **Araz Ramazan Ahmad**, meraih gelar Doktor dalam bidang Media Elektronik dari Salahadin University, Erbil, Kurdistan Region, Iraq, pada tahun 2018. Penulis adalah Dosen dan Direktur Hubungan Internasional, Media, dan Publikasi di University of Raparin, Ranya, Kurdistan Region, Iraq, dan Tishk International University, Erbil, Kurdistan Region, Iraq.
E-Mail: araz.ahmad85@uor.edu.krd